



Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



 inspektoratbantul

 inspektorat daerah
kabupaten bantul

 inspektorat@bantulkab.go.id

 www.inspektorat.bantulkab.go.id

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
Jl. Prof. Dr. Soepomo, Mandingan, Ringinharjo
Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, DI. Yogyakarta
Kode Pos 55712 Telp/Fax (0274) 357325

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Alloh SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga dapat tersusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan sampai dengan akhir tahun 2024.

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan ini merupakan realisasi kewajiban yang harus dipenuhi sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan 31 Desember 2024 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bantul, Januari 2025

Plt. Inspektur,



Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740322 199311 1 002

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	2
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	4
2.1. Ekonomi Makro.....	4
2.2. Kebijakan Keuangan.....	5
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja.....	6
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	14
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	14
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.....	18
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	19
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	19
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	19
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	19
4.3.1 Kas.....	19
4.3.2 Persediaan.....	19
4.3.3 Investasi Jangka Panjang.....	20

4.3.4	Aset Tetap	20
4.3.5	Aset lainnya	20
4.3.6	Kewajiban Jangka Panjang	20
4.3.7	Ekuitas Dana	20
3.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan	21
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN		26
5.1.	Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	26
5.2.	Penjelasan Pos-pos Neraca	27
5.2.1	Penjelasan Umum Neraca	27
5.2.2	Penjelasan Per Pos Neraca	28
4.3	Penjelasan Umum Laporan Operasional	29
4.3.1	Penjelasan Umum Laporan Operasional	29
4.3.2	Penjelasan per Pos Laporan Operasional	30
4.4	Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas	30
4.4.1	Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas	30
4.4.2	Penjelasan per Pos Laporan Perubahan Ekuitas	31
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN		32
5.1	Profil Organisasi	32
5.2	Susunan Organisasi	32
5.3	Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya	33
BAB VII PENUTUP		34
LAMPIRAN		35

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Capaian Target Kinerja Tahun 2024.....	7
Tabel 3. 1 Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2024.....	14
Tabel 3. 2 Pencapaian Anggaran Tahun 2024.....	14
Tabel 3. 3 Realisasi Belanja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024.....	15



Daftar Gambar

Gambar 6. 1 Bagan Struktur Organisasi 33

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang terdiri dari: (a) Surat Pernyataan, (b) Laporan Realisasi Anggaran APBD, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Neraca, (f) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangann tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bantul, Januari 2025

Plt. Inspektur,



Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740322 199311 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan-laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupten Bantul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024; dan
12. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Inspektorat Daerah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan, perubahan anggaran yang dilakukan realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah, berupa gambaran realisa Keuangan pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Sebagai satuan kerja pemerintah daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merupakan pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh kepala satuan kerja dan bertanggung jawab atas entitasnya. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul. Adapun rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

VISI

Sebagai pandangan ideal untuk mewujudkan cita-cita sebuah organisasi, maka pernyataan visi telah dirumuskan secara bersama-sama untuk menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan cita-cita Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun pernyataan visi adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”**.

Pernyataan visi di atas merujuk pada ciri-ciri pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang antara lain ditandai dengan adanya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, terwujudnya pemerintahan yang transparan dalam arti terbukanya informasi bagi semua pihak yang berkepentingan, dapat dipertanggungjawabkan, efektif dan efisien serta terselenggaranya pelayanan prima bagi masyarakat.

MISI

Adapun misi yang ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.**

TUJUAN

Sebagaimana definisi yang ada dalam penyusunan Renstra, maka pengertian tujuan adalah suatu target kinerja yang dapat dicapai dalam waktu tertentu dan terukur. Dengan mempertimbangkan kondisi strategik yang ada maka telah ditetapkan yaitu **Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel.**

SASARAN

Sasaran adalah suatu pernyataan yang merujuk pada tugas-tugas spesifik sebuah organisasi yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah **Meningkatnya Transparansi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi.**

KEBIJAKAN

Keberadaan institusi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai konsekuensi untuk menciptakan kabupaten yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN.

PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program-program yang ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
3. Program Perumusan kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi.

KEGIATAN

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja dan rencana pencapaiannya. Kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
8. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
9. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan; dan
10. Pendampingan dan Asistensi.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2024 juga dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran, serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja; dan
- c. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menunjukkan sesuatu yang harus dicapai atau diwujudkan instansi pemerintah atas kegiatan yang dilakukannya pada periode tertentu sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya.

Tahun 2024 Inspektorat Daerah melaksanakan 3 (tiga) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan. Pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 dapat diuraikan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Target Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2024 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	4	5	6	7			
1	Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase PD Pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	0	0	0	0	0%	
1.1		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yang ditindaklanjuti	Persen	0	0	0	0	0%	
1.1.1		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Laporan	0	0	0	0	0%	0%
2	Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	83	11.630.161.645	86,26	10.671.598.959	103,93%	91,76%
2.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	95	16.350,000	95	16.350.000	100 %	100 %

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2024 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					5		6		7	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	4	6	9.000.000	8	9.000.000	133,33%	100 %
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	9.000.000	8	9.000.000	133,33%	100 %
2.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	7.350.000	6	7.350.000	100 %	100 %
2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persen	100	10.451.826.558	100	9.545.552.048	100,00%	91,33%
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	56	10.320.491.558	52	9.415.717.048	92,86%	91,23%
2.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	124.885.000	12	123.385.000	100 %	98,80%
2.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	22	6.450.000	24	6.450.000	109,09%	100 %
2.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	95	167.830.000	95	129.764.669	100,00%	77,32%
2.3.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	10.250.000	2	10.162.500	100 %	99,15%
2.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	32	157.580.000	33	119.602.169	103,13%	75,90%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2024 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					5		6		7	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	4	95	530.192.268	95	518.667.316	100%	97,83%
2.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen						
2.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	9	2.553.100	9	2.553.100	100%	100 %
2.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	21	33.366.626	21	32.661.180	100%	97,89%
2.4.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	25	17.099.842	25	17.078.600	100%	99,88%
2.4.5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	52.635.900	8	51.635.900	100%	98,10%
2.4.6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	7.500.000	6	7.440.000	100%	99,20%
2.4.7		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	22	26.250.000	30	26.225.000	136,36%	99,90%
2.4.8		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	170	352.876.000	185	343.168.480	108,82%	97,25%
2.4.9		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2500	33.410.800	2500	33.405.056	100%	99,98%
2.4.10		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	4.500.000	12	4.500.000	100%	100%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2024 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	4	5	6	7			
2.5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95	248.185.812	95	247.553.898	100%	99,75%
2.5.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	4.200.000	12	3.568.086	100%	84,95%
2.5.2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	49.350.000	4	49.350.000	100%	100 %
2.5.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	194.635.812	24	194.635.812	100%	100 %
2.6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Persen	95	215.777.007	95	213.711.028	100%	99,04%
2.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	180.787.800	23	178.721.928	100%	98,86%
2.6.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	34.989.207	1	34.989.100	100%	99,9%
3	Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Ketaatan Peringkat Daerah Terhadap Peraturan yang Berlaku	Persen	14	133.727.500	14	131.637.500	100%	98,44%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2024 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					5		6		7	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	4	100	126.352.500	100	124.262.500	100%	98,35%
3.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persen	100	126.352.500	100	124.262.500	100%	98,35%
3.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	16	33.915.000	16	32.320.000	100 %	95,30%
3.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	89	6.562.500	89	6.562.500	100 %	100 %
3.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	204	7.350.000	208	7.350.000	101,96%	100 %
3.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	100	14.000.000	100	14.000.000	100 %	100 %
3.1.5	Pengawasan Desa	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	42	11.675.000	42	11.180.000	100 %	95,76%
3.1.6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	4.250.000	6	4.250.000	600 %	100 %
3.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	48.600.000	4	48.600.000	100 %	100 %
3.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti	Persen	100	7.375.000	100	7.375.000	100 %	100 %
3.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	1.250.000	1	1.250.000	100 %	100 %
3.2.3	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	10	6.125.000	10	6.125.000	100 %	100 %

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2024 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	4	5	6	7			
4	Meningkatnya Transparansi, Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Persen	30	938.165.000	30%	931.258.000	100%	99,26%
4.1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait regulasi di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Persen	80	10.600.000	80	10.600.000	100 %	100 %
4.1.1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomenda si	6	8.100.000	6	8.100.000	100 %	100 %
4.1.2		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomenda si	2	2.500.000	2	2.500.000	100 %	100 %
4.2		Pendampingan dan Asistensi	Persentase laporan pendampingan dan asistensi	Persen	100	927.565.000	100	920.658.000	100,00%	99,26%
4.2.1		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	14	4.800.000	14	4.800.000	100 %	100 %
4.2.2		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	29	2.500.000	29	2.500.000	100 %	100 %
4.2.3		Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	36	899.302.500	36	892.958.000	100 %	99,29%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2024 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	4	5	6	7	7	7	Rp
4.2.4		Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	16	20.962.500	16	20.400.000	100 %	97,32%
		J U M L A H			100%	12.702.054.145		11.734.494.459		92,38%

Sumber : esakip.bantul-kab.id

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan pada Inspektorat Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Inspektorat Daerah bukan merupakan OPD penghasil sehingga tidak ada sajian pendapatan.

b. Belanja

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya maka pada tahun 2024 ini Inspektorat Daerah mendapatkan alokasi Anggaran Belanja murni sebesar Rp12.165.957.323,- dan anggaran perubahan sebesar Rp12.702.054.145,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2024

Uraian	APBD Murni	APBD-P
BELANJA OPERASI	Rp12.165.337.323,-	Rp12.701.434.145,-
Belanja Pegawai	Rp9.771.854.736,-	Rp10.445.376.558,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp2.393.482.587,-	Rp2.256.057.587,-
BELANJA MODAL	Rp620.000,-	Rp620.000,-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp620.000,-	Rp620.000,-
Jumlah	Rp12.165.957.323,-	Rp12.702.054.145,-

Sumber : SIPD-RI

Adapun Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp12.702.054.145,- terealisasi Rp11.734.494.459,- (92,38 %) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 2
Pencapaian Anggaran Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	BELANJA OPERASI	12.701.434.145	11.733.874.459	92.38 %
1	Belanja Pegawai	10.445.376.558	9.539.102.048	91.32 %
2	Belanja Barang dan Jasa	2.256.057.587	2.194.772.411	97.28 %
	BELANJA MODAL	620.000	620.000	100 %
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	620.000	620.000	100 %
		12.702.054.145	11.734.494.459	92.38 %

Sumber : SIPD 2024

Secara lebih detail gambaran realisasi belanja program kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Realisasi Belanja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	11.630.161.645	10.671.598.959	(304.599.145)	91,76
6.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASIKINERJA PERANGKAT DAERAH	16.350.000	16.350.000	0.00	91,76
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.000.000	9.000.000	0.00	100
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.350.000	7.350.000	0.00	100
6.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.451.826.558	9.545.552.048	(906.274.510)	91,33
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.320.491.558	9.415.717.048	(904.774.510)	91,23
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	124.885.000	123.385.000	(1.500.000)	98,80
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	6.450.000	6.450.000	-	100
6.01.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	167.830.000	129.764.669	(38.065.331)	77,32
6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.250.000	10.162.500	(87.500)	99,15
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	157.580.000	119.602.169	(37.977.831)	75,90
6.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	530.192.268	518.667.316	(11.524.952)	97,83
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.553.100	2.553.100	-	100
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.366.626	32.661.180	(705.446)	97,89
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.099.842	17.078.600	(21.242)	99,88
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.635.900	51.635.900	(1.000.000)	98,10
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	7.440.000	(60.000)	99,20
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.250.000	26.225.000	(25.000)	99,90
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	352.876.000	343.168.480	(9.707.520)	97,25
6.01.01.2.06.10	Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	33.410.800	33.405.056	(5.744)	99,98

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.500.000	4.500.000	-	100
6.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	248.185.812	247.553.898	(631.914)	99,75
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.200.000	3.568.086	(631.914)	84,95
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.350.000	49.350.000	-	100
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	194.635.812	194.635.812	-	100
6.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	215.777.007	213.711.028	(2.065.979)	99,04
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.787.800	178.721.928	(2.065.872)	98,86
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.989.207	34.989.100	(107)	99,9
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	133.727.500	131.637.500	(2.090.000)	98,44
6.01.02.2.01	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	126.352.500	124.262.500	(2.090.000)	98,35
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	33.915.000	32.320.000	(1.595.000)	95,30
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6.562.500	6.562.500	-	100
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	7.350.000	7.350.000	-	100
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	14.000.000	14.000.000	-	100
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	11.675.000	11.180.000	(495.000)	95,76
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	4.250.000	4.250.000	-	100
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	48.600.000	48.600.000	-	100
6.01.02.2.02	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	7.375.000	7.375.000	-	100
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	1.250.000	1.250.000	-	100
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6.125.000	6.125.000	-	100
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	938.165.000	931.258.000	(6.907.000)	99,26

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
6.01.03.2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	10.600.000	10.600.000	-	100
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	8.100.000	8.100.000	-	100
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	2.500.000	2.500.000	-	100
6.01.03.2.02	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	927.565.000	920.658.000	(6.907.000)	99,26
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	4.800.000	4.800.000	-	100
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2.500.000	2.500.000	-	100
6.01.03.2.02.03	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	899.302.500	892.958.000	(6.344.500)	99,29
6.01.03.2.02.04	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	20.962.500	20.400.000	(562.500)	97,32
	JUMLAH BELANJA DAERAH	12.702.054.145	11.734.494.459	(967.559.686)	92,38
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.702.054.145)	(11.734.494.459)	967.559.686	92,38
	(SILPA)	(12.702.054.145)	(11.734.494.459)	967.559.686	92,38

Sumber : SIPD 2024

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Berdasarkan realisasi anggaran belanja pada Inspektorat Daerah sampai dengan akhir tahun 2024 menunjukkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan secara keseluruhan tidak ada hambatan yang berarti. Deviasi keuangan berasal dari Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya deviasi yaitu efisiensi belanja pengiriman peserta diklat bagi JFA, dimana pelaksanaan diklat menyesuaikan dengan penyelenggara diklat dan adanya fasilitasi anggaran dari BKPSDM. Untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik menyesuaikan dengan tagihan telepon dan air.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan Inspektorat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya kepada entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

4.3.1 Kas

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang kertas, uang logam, dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran/pemegang kas per tanggal 31 Desember. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah.

4.3.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional OPD dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan dalam rangka pelayanan. Persediaan antara lain, terdiri atas alat tulis kantor, kertas, benda pos, perabot kantor, bahan komputer, dan alat listrik.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh OPD dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarsasi fisik (*stock opname*).

4.3.3 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah penanaman dana untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, pada umumnya jauh lebih lama dari itu, dengan tujuan untuk memberikan penghasilan tetap. Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya. Inspektorat Daerah bukan OPD pengelola Investasi.

4.3.4 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- tanah;
- peralatan dan mesin;
- gedung dan bangunan;
- jalan, irigasi, dan jaringan; dan
- aset tetap lainnya.

4.3.5 Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:

- aset tak berwujud

4.3.6 Kewajiban Jangka Panjang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Inspektorat Daerah bukan OPD pengelola Dana Investasi

4.3.7 Ekuitas Dana

1. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana terdiri atas - Ekuitas Dana Lancar, yaitu selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Inspektorat Daerah merupakan pengelola barang persediaan.
2. Ekuitas Dana Investasi (EDI) merupakan selisih antara jumlah investasi permanen, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang. EDI meliputi dana yang diinvestasikan dalam Investasi Permanen, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya, dan

dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Mencerminkan kekayaan pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Inspektorat Daerah berupa aset tetap dan aset lainnya. - Ekuitas Dana Cadangan merupakan ekuitas dana yang telah dicadangkan untuk tujuan tertentu. Rekening ini merupakan pasangan rekening dana cadangan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta aturan perundangundangan. Inspektorat Daerah tidak dibenarkan menganggarkan Dana Cadangan.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara). Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayahnya merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual.
3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :
 - a. Kas dan Setara Kas
 - 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah. Kas dapat berupa uang tunai dan saldo simpanan di bank. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam dalam mata uang rupiah dan mata uang asing yang dikuasai oleh pemerintah. Kas dalam bentuk saldo simpanan di bank adalah uang pada seluruh rekening bank yang dikuasai pemerintah yang dapat digunakan setiap saat.
 - 2) Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah teriri atas saldo rekening di Kas Daerah. setara kas dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah.

- 3) Saldo rekening di Kas daerah merupakan saldo kas pemerintah kabupaten yang berada di rekening kas daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- 4) Setara kas antara lain berupa deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola Bendahara Umum Daerah.
- 5) Kas Pemerintah daerah yang dikuasasi dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah meliputi kas di bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan.
- 6) Kas di bendahara pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran berupa sisa UP/TU yang per tanggal neraca belum disetor.
- 7) Kas di bendahara penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintah bendahara tersebut (saldo pungutan yang diterima) yang per tanggal neraca belum disetor ke Kas daerah.
- 8) Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika terdapat transaksi kas dalam valuta asing maka harus di konversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (*physical inventory taking*). Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah dan dinilai dalam neraca dengan cara:

- 1) biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
- 2) Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- 3) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi

c. Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua Belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanmana investasinya. yaitu non permanen dan permanen.

- 2) Investasi Non permanen
Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu. antara lain dalam bentuk dana bergulir. obligasi atau surat utang. penyertaan modal dalam proyek pembangunan.
- 3) Dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas dan saldo piutang yang dapat ditagih.
- 4) Obligasi dinilai sebesar nilai nominal.
- 5) Penyertaan Modal proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya perencanaan dan biaya lain dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek diserahkan kepada pihak ketiga.

d. Aset tetap

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah kabupaten atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset tetap berwujud harus memenuhi kriteria :
 - a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
 - b) Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal
 - c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
 - d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- 2) Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian. pembangunan. hibah atau donasi. pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah :
 - a) Tanah
 - b) Peralatan dan mesin
 - c) Gedung dan Bangunan
 - d) Jalan. Irigasi dan Jaringan
 - e) Aset tetap Lainnya
 - f) Konstruksi dalam pengerjaan
 - g) Akumulasi Peyusutan
- 3) Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikannya berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

- 4) Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.
 - 5) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
 - 6) Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi (*capitalization threshold*) untuk masing-masing aset adalah sebagai berikut:
 - a) pengeluaran per satuan aset tetap peralatan mesin dan alat olah raga yang sama atau lebih dari Rp300.000.000.- (tiga ratus ribu rupiah)
 - b) pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
 - c) untuk aset tanah, jalan, irigasi dan jembatan dan aset tetap lainnya dikecualikan dari kapitalisasi diatas
- e. Ekuitas Dana
- 1) Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah kabupaten yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah kabupaten yang terdiri dari Ekuitas dana Lancar, Ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan
 - 2) Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek
 - 3) Ekuitas Dana Investasi merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dikurangi dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang
 - 4) Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu
- f. Belanja
- 1) Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi beban daerah.
 - 2) Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadinya pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.
 - 3) Penerapan Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

- 4) Penerapan kebijakan akuntansi belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusunan terhadap aset tetap.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 189, laporan keuangan Perangkat Daerah (PD) pemerintah terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar, sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Inspektorat Daerah yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan DPA dengan rencana yang tertuang dalam APBD, yaitu dengan menghitung selisih antara realisasi anggaran dengan realisasi belanja pada pos-pos pembiayaan.

Pada tahun anggaran 2024 struktur APBD Inspektorat Daerah hanya meliputi komponen belanja. Inspektorat Daerah bukan merupakan salah satu OPD penghasil pendapatan, sehingga tidak memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bantul.

Dalam rangka memberi gambaran secara umum mengenai penjelasan laporan realisasi APBD pada Inspektorat Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut.

5.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran

Dari pagu anggaran belanja daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.702.054.145,- realisasinya mencapai Rp11.734.494.459,- atau 92,38%. Adapun perincian dari realisasi Belanja Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	12.701.434.145	11.733.874.459	(967.559.686)	92,38
5.1.01	Belanja Pegawai	10.445.376.558	9.539.102.048	(906.274.510)	91,32
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.256.057.587	2.194.772.411	(61.285.176)	97,28
5.2	BELANJA MODAL	620.000	620.000	0	100
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	620.000	620.000	0	100
	JUMLAH BELANJA DAERAH	12.702.054.145	11.734.494.459	(967.559.686)	92,38
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.702.054.145)	(11.734.494.459)	967.559.686	92,38
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.702.054.145)	(11.734.494.459)	967.559.686	92,38

Sumber : SIPD

1. Belanja Operasi dengan anggaran sebesar Rp12.701.434.145,- terealisasi sebesar Rp11733.874.459,- atau 92,38%.

Belanja Operasi meliputi:

- a. Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp10.445.376.558,- terealisasi sebesar Rp9.539.102.048,- atau 91,32%
 - b. Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp2.256.057.587,- terealisasi Rp2.194.772.411,- atau 97,28%
2. Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp620.000,- terealisasi Rp620.000,- atau 100% berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Belanja Modal Pompa).

5.2. Penjelasan Pos-pos Neraca

5.2.1 Penjelasan Umum Neraca

Posisi neraca per 31 Desember 2024 terdiri atas Aset sebesar Rp 748.738.066,32; kewajiban sebesar Rp 289.732.00 dan Ekuitas sebesar Rp 748.448.334,32.

5.2.2 Penjelasan Per Pos Neraca

1. Aset Lancar

a. Kas di bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0.-

b. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 34.530.180.00 dalam bentuk persediaan barang habis pakai. terdiri atas:

1) Alat Tulis Kantor	= Rp 12.916.050.-
2) Kertas dan Cover	= Rp 15.206.230.-
3) Benda Pos	= Rp 300.000.-
4) Bahan Komputer	= Rp 1.966.800.-
5) Perabot Kantor	= Rp 2.762.500.-
6) Alat Listrik	= Rp 1.378.600.-

Total aset lancar sebesar Rp 34.530.180.00 (tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh rupiah).

2. Aset Tetap

a. Tanah

Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.113.580.00

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.642.057.960

Mutasi/perubahan peralatan mesin sebesar Rp 27.462.500.00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal	: Rp	3.668.900.460.00
Pembelian	: Rp	620.000.00
Penghapusan	: Rp	26.842.500.00
Saldo akhir	: Rp	3.642.057.960.00

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp203.257.000.00

d. Jalan. Irigasi dan Jaringan

Jalan. Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.15.300.000.00

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp 44.262.091.32

Akumulasi Penyusutan Aset tetap sebesar Rp3.216.782.745,00; dengan demikian jumlah Aset Tetap sebesar Rp 714.207.886,32

f. Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud) ATB

Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp211.031.800.00 terdiri atas 4 (empat) software/aplikasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp211.031.800.00. sehingga jumlah aset lainnya Rp0,-

3. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp289.732.00 terdiri atas Hutang tagihan air bulan Desember sebesar Rp204.200.- dan tagihan telepon bulan Desember sebesar Rp85.532.-

4. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp748.448.334,32

5.3 Penjelasan Umum Laporan Operasional

5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Operasional

Pendapatan Daerah pada TA 2024 (31 Desember 2024) : Nihil. Beban operasi TA 2024 (31 Desember 2024) sebesar Rp11.733.822.455 terdiri dari beban pegawai sebesar Rp9.539.102.048,00; beban barang dan jasa sebesar Rp2.194.720.40700 serta beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp245.144.592.86

5.3.2 Penjelasan per Pos Laporan Operasional

a. Pendapatan

Pendapatan Daerah pada TA 2024 (31 Desember 2024): Nihil. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul tidak mengelola / menghasilkan pendapatan asli daerah sehingga tidak mempunyai sumber pendapatan.

b. Beban Operasi

Beban diakui saat timbulnya kewajiban. terjadinya konsumsi aset. atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah atau bendahara pengeluaran.

Beban operasi TA 2024 terdiri atas beban pegawai, beban barang dan jasa, dan beban penyusutan dan amortisasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
8.1.01	Beban Pegawai	9.539.102.048,00
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.389.531.341,00
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.026.185.707,00
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	123.385.000,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	2.194.720.407,00
8.1.02.01	Beban Barang	618.682.708,00
8.1.02.02	Beban Jasa	1.108.082.750,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	108.021.800,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	358.433.149,00
8.1.02.05	Beban Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	1.500.000,00
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	245.144.592,86
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	240.696.952,86
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.065.140,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	382.500,00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00
	JUMLAH BEBAN DAERAH	11.978.967.047,86
	SURPLUS / DEFISIT LO	(11.978.967.047,86)

5.4 Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas awal sebesar Rp1.089.434.542,43; Defisit-LO sebesar Rp11.978.967.047,86 Aset/ Ekuitas Untuk dikonsolidasikan sebesar Rp12.659.547.893,00; dampak kumulatif perubahan kebijakan adalah sebesar Rp11.734.494.459,00 sehingga Ekuitas Akhir Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp748.448.334,32

5.4.2 Penjelasan per Pos Laporan Perubahan Ekuitas

a. Ekuitas awal

Ekuitas awal merupakan saldo akhir TA 2023. sebesar Rp1.089.434.542,43.

b. Defisit-LO

Defisit-LO adalah sebesar (Rp11.978.967.047,86)

c. Aset/ Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Aset/ Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp12.659.547.893.00.

d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan adalah sebesar Rp11.734.494.459.00

e. Ekuitas Akhir

Ekuitas merupakan saldo ekuitas Inspektorat Kabupaten Bantul per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp748.448.334,32.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Profil Organisasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

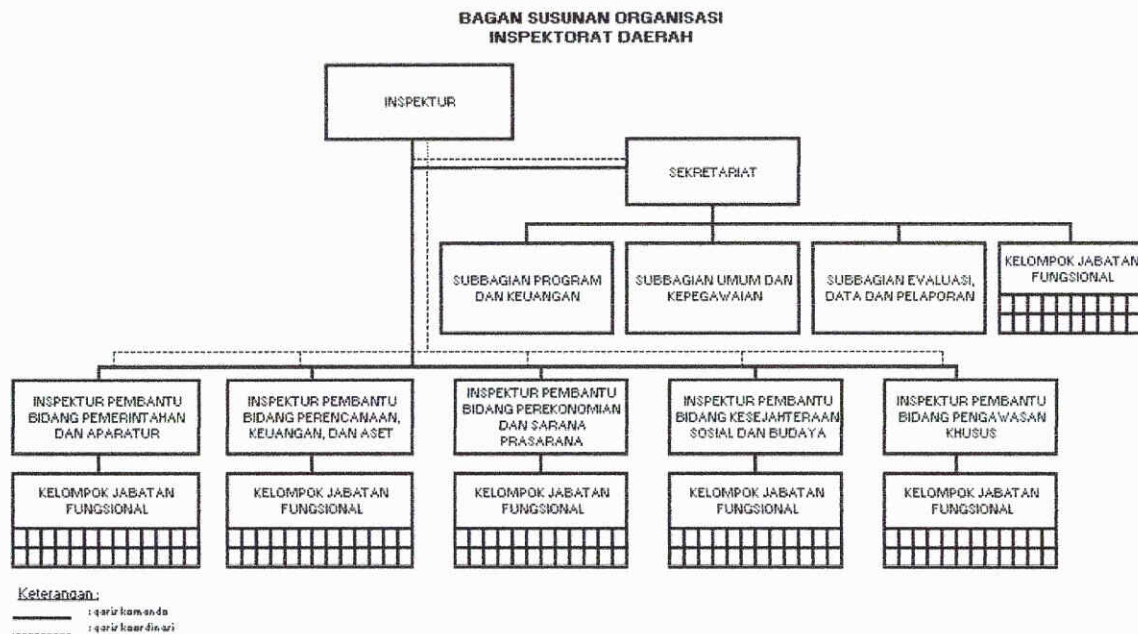
6.2 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah bahwa Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur;
2. Sekretariat. dipimpin Sekretaris yang terdiri atas :
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Evaluasi, Data, dan Pelaporan;
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
4. Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah;

5. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana;
6. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya;
7. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 6. 1
Bagan Struktur Organisasi



Sumber: Perbup Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah

6.3 Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Daerah Kabupten Bantul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024; dan
5. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

BAB VII PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan sebagai laporan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan *per 31 Desember 2024* ini masih belum sempurna. oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bantul, Januari 2025

Plt. Inspektur



Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740322 199311 1 002

LAMPIRAN



PEMERINTAHAN KAB. BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	12.702.054.145,00	11.734.494.459,00	92,38	12.659.547.893,00
5.1	BELANJA OPERASI	12.701.434.145,00	11.733.874.459,00	92,38	12.225.347.893,00
5.1.01	Belanja Pegawai	10.445.376.558,00	9.539.102.048,00	91,32	7.924.703.065,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.256.057.587,00	2.194.772.411,00	97,28	4.300.644.828,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	12.701.434.145,00	11.733.874.459,00	92,38	12.225.347.893,00
5.2	BELANJA MODAL	620.000,00	620.000,00	100,00	434.200.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	620.000,00	620.000,00	100,00	416.100.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	18.100.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	620.000,00	620.000,00	100,00	434.200.000,00
	JUMLAH BELANJA	12.702.054.145,00	11.734.494.459,00	92,38	12.659.547.893,00
	SURPLUS/DEFISIT	(12.702.054.145,00)	(11.734.494.459,00)	92,38	(12.659.547.893,00)

Kab. Bantul, 31 Desember 2024
Plt. Kepala Inspektorat Daerah
Hermawan Setiaji, S.IP., M.H
NIP. 197403221993111001



PEMERINTAHAN KAB. BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	11.978.967.047,86	16.451.041.398,71	(4.472.074.350,85)	(27,18)
8.1	BEBAN OPERASI	11.733.822.455,00	12.225.347.893,00	(491.525.438,00)	(4,02)
8.1.01	Beban Pegawai	9.539.102.048,00	7.924.703.065,00	1.614.398.983,00	20,37
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	2.194.720.407,00	4.300.644.828,00	(2.105.924.421,00)	(48,97)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	11.733.822.455,00	12.225.347.893,00	(491.525.438,00)	(4,02)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	245.144.592,86	4.225.693.505,71	(3.980.548.912,85)	(94,20)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	240.696.952,86	107.163.106,64	133.533.846,22	124,61
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.065.140,00	297.271.267,15	(293.206.127,15)	(98,63)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	382.500,00	3.781.721.239,60	(3.781.338.739,60)	(99,99)
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	39.537.892,32	(39.537.892,32)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	245.144.592,86	4.225.693.505,71	(3.980.548.912,85)	(94,20)
	JUMLAH BEBAN	11.978.967.047,86	16.451.041.398,71	(4.472.074.350,85)	(27,18)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(11.978.967.047,86)	(16.451.041.398,71)	4.472.074.350,85	(27,18)

Kab. Bantul, 31 Desember 2024
Plt. Kepala Inspektorat Daerah
Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.
NIP.197403221993111001



PEMERINTAH KAB. BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	1.089.434.542,43	929.315.
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(11.978.967.047,86)	(16.451.041
RK PPKD	11.734.494.459,00	16.611.160
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(19.912.740,00)	0,00
Alat Tulis Kantor	430.760,00	0,00
Kertas dan Cover	(12.601.500,00)	0,00
Benda Pos	(2.700.000,00)	0,00
Bahan Komputer	(569.600,00)	0,00
Perabot Kantor	(4.302.000,00)	0,00
Alat Listrik	(170.400,00)	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(76.600.879,25)	0,00
Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	(1.900.000,00)	0,00
Alat Pendingin	(400.000,00)	0,00
Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	(14.500.000,00)	0,00
Personal Computer	(10.662.500,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	0,43	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	0,29	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur,	1.900.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan	0,02	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	200,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	0,01	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	400.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan	7.250.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	10.662.500,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(69.351.080,00)	0,00
EKUITAS AKHIR	748.448.334,32	1.089.434

Kab. Bantul, 31 Desember 2024

Plt. Kepala Inspektorat Daerah

Hermawan Setiaji, S.IP., M.H

NIP. 19740322199311001

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN KAB. BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH Neraca
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode	Uraian	2024	2023
1	ASET	748.738.066,32	1.089.776.278,43
1.1	ASET LANCAR	34.530.180,00	54.442.920,00
1.1.12	Persediaan	34.530.180,00	54.442.920,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	34.530.180,00	54.442.920,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan	34.530.180,00	54.442.920,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	12.916.050,00	12.485.290,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	15.206.230,00	27.807.730,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	300.000,00	3.000.000,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	1.966.800,00	2.536.400,00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	2.762.500,00	7.064.500,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	1.378.600,00	1.549.000,00
	JUMLAH ASET	34.530.180,00	54.442.920,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	714.207.886,32	965.982.278,43
1.3.01	Tanah	26.113.580,00	26.113.580,00
1.3.01.01	Tanah	26.113.580,00	26.113.580,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	26.113.580,00	26.113.580,00
	Tanah Bangunan		
1.3.01.01.01.0001	Tempat Tinggal	17.794.000,00	17.794.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan	8.319.580,00	8.319.580,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	3.642.057.960,00	3.668.900.460,00
1.3.02.01	Alat Besar	620.000,00	0,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	620.000,00	0,00
1.3.02.01.03.0005	Pompa	620.000,00	0,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.637.999.500,00	1.637.999.500,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat	1.637.999.500,00	1.637.999.500,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor	1.276.617.500,00	1.276.617.500,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda	191.593.500,00	191.593.500,00
1.3.02.02.01.0009	Alat Angkutan Darat	169.788.500,00	169.788.500,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	108.150.000,00	110.050.000,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	8.250.000,00	10.150.000,00
1.3.02.03.02.0011	Peralatan Ukur, Gip dan	8.250.000,00	10.150.000,00

Kode	Uraian	2024	2023
1.3.02.03.03	Alat Ukur	99.900.000,00	99.900.000,00
1.3.02.03.03.0008	Alat Ukur/Pembanding	1.750.000,00	1.750.000,00
1.3.02.03.03.0021	Alat Ukur Lainnya	98.150.000,00	98.150.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah	937.715.675,00	938.115.675,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	401.996.400,00	401.996.400,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	212.138.400,00	212.138.400,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	189.858.000,00	189.858.000,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	527.524.275,00	527.924.275,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	150.135.600,00	150.135.600,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	3.655.000,00	3.655.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	146.410.500,00	146.810.500,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	226.848.175,00	226.848.175,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	475.000,00	475.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat	8.195.000,00	8.195.000,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	4.980.000,00	4.980.000,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	475.000,00	475.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	2.740.000,00	2.740.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi,	114.285.000,00	128.785.000,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	7.000.000,00	7.000.000,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	7.000.000,00	7.000.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	15.285.000,00	15.285.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	6.535.000,00	6.535.000,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	8.750.000,00	8.750.000,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	92.000.000,00	106.500.000,00
1.3.02.06.03.0045	Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	0,00	14.500.000,00
1.3.02.06.03.0047	Sumber Tenaga	92.000.000,00	92.000.000,00
1.3.02.10	Komputer	842.007.785,00	852.670.285,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	680.641.775,00	691.304.275,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	680.641.775,00	691.304.275,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	161.366.010,00	161.366.010,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal	161.366.010,00	161.366.010,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	1.280.000,00	1.280.000,00
1.3.02.15.03	Alat SAR	1.280.000,00	1.280.000,00
1.3.02.15.03.0004	Alat SAR Lainnya	1.280.000,00	1.280.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	203.257.000,00	203.257.000,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	203.257.000,00	203.257.000,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempal	167.257.000,00	167.257.000,00

Kode	Uraian	2024	2023
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	95.287.000,00	95.287.000,00
1.3.03.01.01.0004	Bangunan Gedung Instalasi	4.700.000,00	4.700.000,00
1.3.03.01.01.0016	Bangunan Gedung	18.100.000,00	18.100.000,00
1.3.03.01.01.0033	Bangunan Parkir	49.170.000,00	49.170.000,00
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat	36.000.000,00	36.000.000,00
1.3.03.01.02.0002	Rumah Negara Golongan II	36.000.000,00	36.000.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.300.000,00	15.300.000,00
1.3.04.04	Jaringan	15.300.000,00	15.300.000,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	15.300.000,00	15.300.000,00
1.3.04.04.02.0003	Jaringan Listrik Lainnya	15.300.000,00	15.300.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	44.262.091,32	44.262.091,32
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	44.262.091,32	44.262.091,32
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan	44.262.091,32	44.262.091,32
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	43.771.734,32	43.771.734,32
1.3.05.01.01.0004	Buku Ilmu Sosial	247.500,00	247.500,00
1.3.05.01.01.0012	Bahan Perpustakaan	242.857,00	242.857,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(3.216.782.745,00)	(2.991.850.852,89)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Mesin	(3.128.594.985,00)	(2.908.110.732,89)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat	(88.571,00)	0,00
1.3.07.01.01.0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(88.571,00)	0,00
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat	(1.422.085.214,00)	(1.338.399.642,86)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(1.060.703.214,00)	(977.017.642,86)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(191.593.500,00)	(191.593.500,00)
1.3.07.01.02.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	(169.788.500,00)	(169.788.500,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Alat Ukur	(106.160.000,00)	(106.970.000,00)
1.3.07.01.03.0021	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	(6.720.000,00)	(8.110.000,00)

Kode	Uraian	2024	2023
1.3.07.01.03.0031	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	(1.750.000,00)	(1.400.000,00)
1.3.07.01.03.0044	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	(97.690.000,00)	(97.460.000,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(801.525.915,00)	(739.088.555,03)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(196.918.400,00)	(190.468.400,02)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor Lainnya	(123.958.400,00)	(96.001.200,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Tangga-Mebel	(131.550.040,00)	(120.790.480,01)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Tangga-Alat Pembersih	(3.655.000,00)	(3.655.000,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Tangga-Alat Pendingin	(135.223.900,00)	(127.833.300,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(206.467.175,00)	(198.226.175,00)
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(190.000,00)	(95.000,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(1.992.000,00)	(996.000,00)
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(475.000,00)	(475.000,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(1.096.000,00)	(548.000,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(93.085.000,00)	(89.735.000,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio- Peralatan Studio Audio	(4.200.000,00)	(2.800.000,00)

Kode	Uraian	2024	2023
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone	(6.535.000,00)	(6.535.000,00)
1.3.07.01.06.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Sosial	(8.750.000,00)	(8.750.000,00)
1.3.07.01.06.0062	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	0,00	(7.250.000,00)
1.3.07.01.06.0064	Akumulasi Penyusutan Pemancar-Sumber Tenaga	(73.600.000,00)	(64.400.000,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan	(704.370.285,00)	(633.277.535,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit- Personal Computer	(553.904.275,00)	(492.999.025,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Komputer-Peralatan Personal Computer	(150.466.010,00)	(140.278.510,00)
1.3.07.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja	(1.280.000,00)	(640.000,00)
1.3.07.01.15.0013	Akumulasi Penyusutan Alat SAR Lainnya	(1.280.000,00)	(640.000,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan	(85.127.760,00)	(81.062.620,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(85.127.760,00)	(81.062.620,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(45.737.760,00)	(43.832.020,00)
1.3.07.02.01.0004	Akumulasi Penyusutan Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	(752.000,00)	(658.000,00)
1.3.07.02.01.0016	Akumulasi Penyusutan Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	(724.000,00)	(362.000,00)
1.3.07.02.01.0033	Akumulasi Penyusutan Kerja-Bangunan Parkir	(9.834.000,00)	(8.850.600,00)
1.3.07.02.01.0039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	(28.080.000,00)	(27.360.000,00)

Kode	Uraian	2024	2023
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(3.060.000,00)	(2.677.500,00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan	(3.060.000,00)	(2.677.500,00)
1.3.07.03.04.0008	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya	(3.060.000,00)	(2.677.500,00)
	JUMLAH ASET TETAP	714.207.886,32	965.982.278,43
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	0,00	69.351.080,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	211.031.800,00	211.031.800,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	211.031.800,00	211.031.800,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	211.031.800,00	211.031.800,00
1.5.03.01.01.0005	Software	211.031.800,00	211.031.800,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Berwujud	(211.031.800,00)	(141.680.720,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Berwujud	(211.031.800,00)	(141.680.720,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Berwujud	(211.031.800,00)	(141.680.720,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Berwujud-Software	(211.031.800,00)	(141.680.720,00)
	JUMLAH ASET	0,00	69.351.080,00
	JUMLAH ASET	748.738.066,32	1.089.776.278,43
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	289.732,00	341.736,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA	289.732,00	341.736,00
2.1.06	Utang Belanja	289.732,00	341.736,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan	289.732,00	341.736,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	289.732,00	341.736,00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Telepon	85.532,00	99.436,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-	204.200,00	242.300,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	289.732,00	341.736,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	289.732,00	341.736,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	748.448.334,32	1.089.434.542,43
3.1	EKUITAS	748.448.334,32	1.089.434.542,43
3.1.01	Ekuitas	(10.986.046.124,68)	(15.521.725.794,81)
3.1.01.01	Ekuitas	992.920.923,18	929.315.603,90
3.1.01.01.01	Ekuitas	992.920.923,18	929.315.603,90

Kode	Uraian	2024	2023
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	992.920.923,18	929.315.603,90
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(11.978.967.047,86)	(16.451.041.398,71)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(11.978.967.047,86)	(16.451.041.398,71)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(11.978.967.047,86)	(16.451.041.398,71)
3.1.03	Ekuitas untuk	11.734.494.459,00	16.611.160.337,24
3.1.03.01	RK PPKD	11.734.494.459,00	16.611.160.337,24
3.1.03.01.01	RK PPKD	11.734.494.459,00	16.611.160.337,24
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	11.734.494.459,00	16.611.160.337,24
	JUMLAH EKUITAS	748.448.334,32	1.089.434.542,43
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	748.738.066,32	1.089.776.278,43

Kab. Bantul, 31-12-2024
 Plt. Kepala Inspektorat Daerah

 Hermawan Setiaji, S.IP., M.H
 NIP. 197403221993111001

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL